

# **PENGARUH BELANJA NEGARA & TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Kasus pada Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau)**

Teguh Pribadi, Dimas Pratama, Joshua Harris Pardamean Samosir,  
Kemal Alfathan, Afdhal Kurniawan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

## **Abstract**

*The research objective to be achieved from this study is to determine the contribution of the influence of government spending, especially the functions of the Economy, Health, and Education plus the Transfer to Local Government (TLG) on the achievement of the Human Development Index (HDI) in the scope of the Kepulauan Riau Province. The independent variable in this study is Government Expenditure (State & Local Government) and TLG, as the Dependent Variable is HDI which will be broken down into each dimension (Health Dimension, Education Dimension, & Welfare Dimension). This research is using panel data regression analysis. The results of this study can be used as a consideration for fiscal authorities at the Central Government to Local Government levels in formulating policies to increase the effectiveness of government spending. Not only in terms of the effectiveness of allocations and spending, but also in terms of quality and good spending acceleration will greatly encourage an optimal multiplier effect for increasing HDI and overall economic growth*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kontribusi pengaruh belanja pemerintah khususnya fungsi Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan ditambah dengan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Belanja Negara (Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah) dan TKDD. Sedangkan Variabel Dependennya adalah IPM yang akan dirinci ke dalam setiap Dimensinya (Dimensi Angka Harapan Hidup, Dimensi Pendidikan, & Dimensi Kesejahteraan). Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi otoritas fiskal di tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan peningkatan efektivitas belanja pemerintah. Tidak hanya sisi efektivitas alokasi dan belanjanya saja, namun juga dari sisi kualitas serta akselerasi belanjanya yang baik akan sangat mendorong multiplier effect yang optimal bagi peningkatan IPM dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Keywords:** Belanja Pemerintah, Dana Desa, Fiskal, Keuangan Negara, Transfer ke Daerah,

**JEL Classification:** H5 (National Government Expenditures and Related Policies), H7 (State & Local Government; Intergovernmental Relations)

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disamping kesejahteraan dan penghidupan yang layak, Pemerintah juga selalu berupaya mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia.

Hal tersebut sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum, & mencerdaskan kehidupan bangsa.

Komitmen dan keberhasilan setiap pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan, secara umum dapat diukur melalui beberapa indikator, salah satunya adalah capaian pembangunan manusia (Widodo, 2011 dan Sasana, 2009).

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode pengukuran capaian/indeks pembangunan manusia sebagaimana metode yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNDP (*United Nation Development Programme*) dalam konsensusnya di tahun 1990.

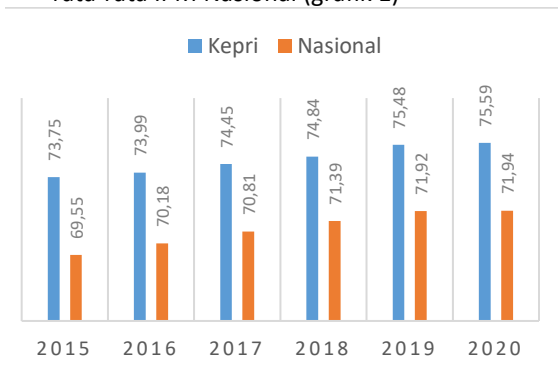
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran capaian pembangunan manusia yang diukur berdasarkan 3 dimensi yaitu Dimensi usia harapan hidup dan kesehatan, Dimensi tingkat Pendidikan, dan Dimensi kehidupan yang layak dengan direpresentasikan menggunakan tingkat pengeluaran riil perkapita.

Pembangunan Sumber Daya Manusia selalu menjadi fokus pemerintah baik dalam rencana jangka pendek serta dalam jangka panjang. Dalam rencana jangka pendek salah satunya, Pemerintah dari tahun ke tahun mengalokasikan 20 %

anggarnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas Pendidikan. Jangka panjangnya, Pemerintah dengan berbagai bauran kebijakannya, mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia unggul di tahun 2045.

Tingginya nilai IPM menggambarkan keseriusan dan keberhasilan pemerintah dalam melakukan investasi pembangunan yang berorientasi kepada manusia (*human centered development*) yang tujuannya adalah meningkatkan produktivitas masyarakat (Nurbaeti, 2013, Sumas, 2012, dan Widodo, 2011)

Berdasarkan data publikasi BPS tahun 2020, dari tahun 2015 hingga tahun 2020 rata-rata IPM Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata IPM Nasional (grafik 1)



Tujuan serta ruang lingkup penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh belanja negara dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dengan populasinya adalah 7 Kabupaten Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kabupaten Karimun. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Belanja Negara yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sedangkan Variabel Dependennya adalah

Indeks Pembangunan Manusia yang kemudian akan dirinci (*breakdown*) ke dalam setiap Dimensinya (Dimensi Angka Harapan Hidup, Dimensi Pendidikan, & Dimensi Kesejahteraan). Data yang akan kita gunakan adalah data realisasi Belanja Negara yang bersumber dari APBN dan data IPM 5 tahun ke belakang (tahun 2016 sd 2020).

Penelitian ini akan menggunakan analisis regresi data panel yang terdiri dari gabungan data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*).

## 2. TINJAUAN LITERATUR

Di dalam Nota Keuangan tahun 2021 dijelaskan mengenai postur APBN dalam hal ini terkait belanja negara, Belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

### 2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi Kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi Pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Sedangkan Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada Kementerian negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dan menurut organisasi berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### 2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah,

Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Peran Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat sangat diperlukan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia di seluruh pelosok daerah, karena hal itulah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga munculah transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka desentralisasi fiskal (kemenkeu 2020).

### 2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Metode penghitungan IPM oleh Badan Pusat Statistik mengacu pada UNDP (*United Nations Development Programme*) yaitu dengan menggunakan 3 dimensi pengukuran.

2.3.1. **Dimensi Umur Panjang dan hidup sehat** yang direpresentasikan oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya.

2.3.2. **Dimensi Pengetahuan atau Pendidikan** diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

2.3.3. **Dimensi pemenuhan standar hidup yang layak** dengan menggunakan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita Akan tetapi mengingat data tersebut tidak tersedia di tingkat daerah, maka alternatifnya adalah berupa indikator pengeluaran riil perkapita yang mampu

mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

#### **2.4. Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan dan Fungsi Pendidikan**

Belanja di bidang Pendidikan dan Kesehatan merupakan wujud konkrit pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia. Semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia, maka akan semakin meningkatnya efisiensi dan produktivitasnya. Atmanti (2005,31) menjelaskan bahwa sejarah mencatat bagi negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia, akan mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah.

#### **2.5. Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi**

Belanja Pemerintah menurut fungsi ekonomi adalah belanja yang berfungsi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, dan kedaulatan pangan serta pembangunan teknologi dan informatika.

#### **2.6. Kerangka Pemikiran**

Belanja Negara merupakan salah satu instrumen fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mustaqimah, Hartoyo, & Fahmi (2017) menyatakan bahwa semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah atas kesehatan maka akan semakin memberikan hasil yang baik terhadap peningkatan Kesehatan, Pendidikan, indeks pembangunan manusia, pengeluaran perkapita, PDRB, *disposable income*, dan pengurangan angka kemiskinan. Sementara peningkatan pengeluaran pemerintah secara agregat atas Kesehatan dan Pendidikan lebih banyak memberi dampak positif dalam pengurangan kemiskinan.

Belanja Negara pada bidang Kesehatan dapat memperbaiki indikator hasil Kesehatan (Boachie,

Ramu, dan Polajeva, 2018). Begitu juga dengan Belanja Fungsi Pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan indikator-indikatornya antara lain angka rata-rata lama sekolah atau rata-rata jenjang pendidikan.

Sedangkan belanja pemerintah fungsi ekonomi merupakan belanja yang dialokasikan dan diperuntukan guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, dan kedaulatan pangan serta pembangunan teknologi dan informatika.

Disamping belanja pemerintah pada tiga fungsi tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan TKDD ke seluruh pemerintah di daerah tidak terkecuali untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Hal ini menunjukkan upaya serta komitmen Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah sangat fokus dalam pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat optimis, salah satunya dapat dilihat dari rata-rata IPM dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan angka yang lebih tinggi dari rata-rata IPM nasional sebagaimana grafik 1 diatas.

Penelitian ini ingin melihat sejauh mana pengaruh belanja pemerintah khususnya fungsi Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan ditambah dengan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap pencapaian IPM tersebut.

#### **2.7. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis pada penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan juga didukung dengan teori-teori tentang belanja pemerintah atau fungsi fiskal pemerintah

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Apakah belanja pemerintah secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM ?
2. Apakah Belanja Fungsi Ekonomi Berpengaruh positif terhadap Dimensi/Indeks Kesejahteraan?
3. Apakah Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif terhadap Dimensi/Indeks Pendidikan?
4. Apakah Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh positif terhadap Dimensi/Indeks Kesehatan?
5. Apakah TKDD berpengaruh positif terhadap IPM secara keseluruhan/utuh?

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh belanja negara dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Keuangan.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang terdiri dari gabungan data runtut waktu (time series) dan data silang (cross section). Data time series adalah data dari objek dengan periode waktu tertentu. Data cross section merupakan data yang diperoleh dari satu atau lebih objek penelitian dalam satu periode yang sama. Penelitian ini menggunakan data time series selama 6 tahun yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, sedangkan data cross section dalam penelitian ini adalah 7 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Total data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  $6 \times 8 = 48$  data.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah belanja negara yang terdiri dari belanja APBN dan APBD serta transfer ke daerah dan dana desa. Sedangkan variabel dependennya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirinci ke dalam setiap dimensinya, yaitu

1. Dimensi angka harapan hidup (life expectancy rate) yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir serta menjadi parameter indikator kesehatan suatu masyarakat.
2. Dimensi pendidikan diukur melalui rata-rata angka melek huruf dan rata-rata jangka waktu sekolah suatu masyarakat.
3. Dimensi kesejahteraan diukur melalui daya beli masyarakat (purchasing power parity) serta parameter pendapatan dengan pengeluaran perkapita untuk mengukur standar hidup masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Belanja Pemerintah secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM**

Belanja Pemerintah (government expenditure) merupakan bagian dari kebijakan fiskal, di mana suatu tindakan pemerintah untuk mengatur perekonomian suatu negara dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun (Rahmita Handayani, 2015). Besarnya pengeluaran dari pemerintah tidak terlepas dari fungsi alokasi APBN itu sendiri yang mana fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dalam menjalankan fungsinya peningkatan pembangunan manusia merupakan salah

satu indikator kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu prioritas dalam pengalokasian APBN. Dalam melakukan regresi data panel statis untuk melihat pengaruh antara Belanja Pemerintah Keseluruhan dengan IPM, terdapat 2 alternatif model yang digunakan yaitu Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM), dalam prosesnya hasil regresi dari kedua model tersebut adalah signifikan dan positif. Selanjutnya, untuk memilih model yang tepat antara FEM dan REM maka dilakukan uji Hausman, dari hasil uji Hausman didapati bahwa  $P\text{ value} > 0,05$ , maka tidak tolak  $H_0$  atau model yang lebih tepat adalah REM. Berdasarkan hasil regresi data panel tersebut, Belanja Pemerintah secara keseluruhan (APBN dan APBD) berpengaruh signifikan dan positif, yang artinya setiap peningkatan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah akan memberikan peningkatan IPM. Setiap peningkatan belanja keseluruhan sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM sebesar 0,066%. Dari hasil tersebut, alokasi belanja APBN dan APBD di provinsi Kepri sudah tepat, sehingga diperlukan peningkatan kontribusi dari belanja tersebut kedepannya dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Riau.

## 2. Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Indeks Kesejahteraan atau Pengeluaran perkapita di wilayah Kepulauan Riau

Belanja Pemerintah menurut fungsi ekonomi adalah belanja yang berfungsi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, dan kedaulatan pangan serta pembangunan teknologi dan informatika.

Di dalam Nota Keuangan APBN 2021 disebutkan bahwa dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, realisasi anggaran fungsi ekonomi secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,5 % yang didorong oleh belanja infrastruktur yang merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah pada kurun

waktu tersebut. Secara umum output anggaran fungsi ekonomi dapat terlihat antara lain dengan telah berhasilnya pembangunan jalur kereta api, sarana perkeretaapian, jalan baru, bendungan, bandara, Pelabuhan dan fasilitas infrastruktur lainnya.

Dari hasil penelitian dapat terlihat, bahwasanya Belanja Pemerintah khususnya pada fungsi ekonomi, tidak memberikan pengaruh secara langsung pada peningkatan pengeluaran perkapita khususnya di dalam ruang lingkup wilayah Kepulauan Riau. Hal ini dapat disebabkan kemungkinan karena adanya variabel *intervening* atau variabel *mediator* yang dibutuhkan di dalam interaksi antara Belanja Pemerintah fungsi ekonomi dengan Pengeluaran perkapita masyarakat, misalnya seperti tingkat inflasi dan jumlah lapangan pekerjaan.

Belanja Pemerintah pada Fungsi Ekonomi, lebih bersifat investasi jangka Panjang yang dampaknya kepada peningkatan kualitas perekonomian baru dapat dicapai pada periode 5 hingga 10 tahun berikutnya atau bahkan lebih dari itu.

## 3. Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pendidikan di wilayah Kepulauan Riau

Belanja pendidikan adalah salah satu belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang atau sering disebut *mandatory spending*. Belanja pendidikan dialokasikan minimal 20% dari APBN (di luar gaji tenaga pendidik dan biaya pendidikan kedinasan). Pada APBD, belanja pendidikan dialokasikan minimal 20% dari APBD juga. Pengalokasian tersebut ditujukan agar masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah berkurang.

Dalam melakukan regresi data panel statis untuk melihat pengaruh antara belanja pendidikan dengan indeks pendidikan, terdapat 2 alternatif model yang digunakan yaitu Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Hasil regresi dari kedua model tersebut adalah signifikan dan positif. Selanjutnya,

untuk memilih model yang tepat antara FEM dan REM maka dilakukan uji Hausman. Hasil uji Hausman menyatakan bahwa  $P \text{ value} > 0,05$ , maka tidak tolak  $H_0$  atau model yang lebih tepat adalah REM. Berdasarkan hasil regresi data panel tersebut, belanja pendidikan berpengaruh signifikan dan positif, yang artinya setiap peningkatan belanja pendidikan akan memberikan peningkatan indeks pendidikan (asumsi *ceteris paribus*). Setiap peningkatan belanja pendidikan sebesar 1% maka akan meningkatkan indeks pendidikan sebesar 0,041%.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri dan Bandiyono (2018). Meningkatnya belanja pendidikan akan diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana pendidikan yang kemudian akan lebih mudah dinikmati oleh masyarakat. Kemudahan masyarakat dalam menikmati sarana dan prasarana pendidikan akan berpengaruh kepada peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Hal ini sejalan dengan tujuan *mandatory spending* untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial. Pemerintah daerah telah menjadi katalisator yang berperan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui belanja pendidikan.

#### **4. Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Kesehatan di wilayah Kepulauan Riau**

Pada UU Nomor 36 Tahun 2009, belanja kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang mana dalam UUD 1945 disebutkan bahwa kesehatan adalah hak dasar manusia. Belanja kesehatan berkaitan langsung dengan aspek terciptanya angka harapan hidup yang merupakan salah satu dimensi dalam indeks pembangunan manusia.

Dalam melakukan regresi data panel statis untuk melihat pengaruh

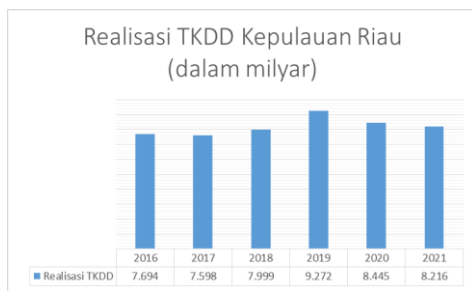
antara belanja kesehatan dengan indeks kesehatan, terdapat 2 alternatif model yang digunakan yaitu Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Hasil regresi dari kedua model tersebut adalah signifikan dan positif. Selanjutnya, untuk memilih model yang tepat antara FEM dan REM maka dilakukan uji Hausman. Hasil uji Hausman menyatakan bahwa  $P \text{ value} > 0,05$ , maka tidak tolak  $H_0$  atau model yang lebih tepat adalah REM. Berdasarkan hasil regresi data panel tersebut, belanja kesehatan berpengaruh signifikan dan positif, yang artinya setiap peningkatan belanja kesehatan akan memberikan peningkatan indeks kesehatan (asumsi *ceteris paribus*). Setiap peningkatan belanja keseluruhan sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pendidikan sebesar 0,019%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Palayukan (2019). Belanja kesehatan digunakan pemerintah Kepulauan Riau untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan dasar serta pelaksanaan program-program kesehatan dalam skala kabupaten/kota maupun provinsi. Peningkatan indeks kesehatan akan berdampak langsung dalam peningkatan dimensi angka harapan hidup dalam IPM. Tentu saja ini menjadi wujud konkrit pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia agar terwujud efisiensi dan produktivitas.

#### **5. TKDD berpengaruh positif terhadap Peningkatan IPM**

Dalam Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2022, diperlihatkan nominal Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang secara garis besar terus meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan peningkatan paling pesat pada tahun 2019. Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi Kepulauan Riau juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2021 dengan peningkatan paling pesat pada tahun 2019.

Peningkatan ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas desentralisasi fiskal.



Dari data di atas dapat dilihat realisasi TKDD di Kepulauan Riau terus meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp7.694,00 milyar hingga mencapai Rp8.216,00 milyar pada tahun 2021. Peningkatan paling pesat terjadi pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp7.999,00 milyar di tahun 2018 meningkat pesat Rp1.271,00 milyar. Nominal yang meningkat pesat tersebut kemungkinan disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mendorong pemerintah meningkatkan realisasi TKDD untuk membantu keuangan daerah.



Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat dari nilai 73.99 di tahun 2016 hingga mencapai nilai 75.79 di tahun 2021. Perlu diingat di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat walaupun sedikit terhambat.

Hasil uji Hausman untuk regresi data panel menunjukkan  $P \text{ value} > 0,05$ , maka tidak menolak  $H_0$  yang berarti model yang lebih tepat adalah *Random Effect Model*. Hasil analisis regresi data panel menggunakan *Random Effect Model* antara Realisasi TKDD dengan Indeks

Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel-variabel tersebut dengan nilai koefisien 2.99. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian dari Palayukan (2019).

Korelasi yang signifikan dan positif dari data-data ini menunjukkan bahwa Realisasi TKDD Provinsi Kepulauan Riau berpengaruh besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dapat disebabkan belanja TKDD yang masuk langsung ke masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai, pembangunan yang berkelanjutan langsung di daerah dan desa serta manfaat perlindungan sosial lainnya yang langsung diterima masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan Belanja Pemerintah memberikan multiplier effect terhadap laju perekonomian beserta indikator-indikator kesejahteraan yang lainnya yang menggambarkan peningkatan kualitas taraf hidup sumber daya manusia di Indonesia yang direpresentasikan dengan capaian IPM.

Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah seberapa besar kontribusi belanja pemerintah pada fungsi Pendidikan, fungsi Kesehatan, dan fungsi Ekonomi terhadap peningkatan IPM di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

IPM yang terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi Pendidikan yang direpresentasikan dengan angka partisipasi sekolah, dimensi Kesehatan yang direpresentasikan dengan angka harapan hidup, dan dimensi kesejahteraan yang direpresentasikan dengan angka pengeluaran per kapita.

Belanja fungsi Pendidikan secara langsung mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks Pendidikan, begitu juga dengan Belanja fungsi Kesehatan yang berkontribusi secara



langsung dengan peningkatan indeks Kesehatan masyarakat.

Adapun belanja pemerintah fungsi ekonomi tidak serta merta secara langsung memberikan kontribusi kepada peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat. Hal ini dapat disebabkan karena belanja pemerintah fungsi ekonomi lebih bersifat investasi jangka panjang yang memberikan multiplier effect kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat baru dapat dirasakan di masa depan pada rentang 5 hingga 10 tahun atau bahkan bisa saja lebih. Belanja fungsi ekonomi memang dialokasikan dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur, transportasi & konektivitas antar wilayah, ketahanan energi, ketahanan pangan, digitalisasi dan telekomunikasi, termasuk juga akses permodalan bagi UMKM.

Interaksi antara belanja fungsi ekonomi dengan peningkatan IPM, juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat inflasi, ketersediaan lapangan kerja, dan faktor-faktor lainnya seperti dampak pandemi COVID-19.

Penelitian ini juga menggambarkan adanya kontribusi TKDD kepada peningkatan IPM secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang menjangkau hingga ke pelosok desa di seluruh nusantara.

Dari hasil penelitian ini, Peneliti dapat memberikan saran kepada pemerintah bahwa alokasi dan belanja pemerintah dapat memberikan *fiscal effect* yang diharapkan secara lebih optimal dengan tidak hanya memperhatikan kuantitas realisasi belanjanya saja, namun harus juga memperhatikan kualitas output belanjanya (*value for money*).

Disamping faktor *value for money*, dalam melaksanakan atau merealisasikan belanja pemerintah yang telah dialokasikan harus dilaksanakan segera sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Penundaan atau keterlambatan pelaksanaan belanja pemerintah dapat menghambat laju perekonomian yang

tentu saja akan berdampak pada kurang optimalnya pencapaian pembangunan manusia

## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi otoritas fiskal baik pada level Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dalam rangka peningkatan efektivitas belanja pemerintah. Tidak hanya sisi efektivitas alokasi dan belanjanya, namun juga dari sisi kualitas serta akselerasi belanja yang baik akan sangat mendukung tercapainya *multiplier effect* yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi secara umum dan peningkatan IPM salah satunya.

Keterbatasan di dalam penelitian ini yaitu hanya melihat interaksi antara belanja pemerintah, TKDD, dengan IPM saja dalam kondisi *ceteris paribus*. Penelitian ini memberikan ruang bagi peneliti-peneliti selanjutnya, untuk mengukur pengaruh variabel-variabel lainnya yang berpotensi mempengaruhi IPM misalnya seperti tingkat inflasi, indeks ketersediaan lapangan pekerjaan, dan kondisi variabel non-ekonomi lainnya seperti adanya dampak pandemi COVID-19.

## REFERENSI

1. Syamsuri TN, A. Bandiyono. 2018. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan IPM dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). Jurnal Info Artha Vol.2., No.1, Halaman 11-28. Banten : Politeknik Keuangan Negara STAN
2. Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.10, No.1, Juni 2009. Semarang: FE Undip
3. Mustaqimah, Hartoyo, Fahmi. 2017. Peran Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Pembangunan Manusia dalam

Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Vol. 6 No.2 Halaman 1-15. Bogor : Institut Pertanian Bogor.

4. Nurbaeti. 2013. Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. Economics Development Analysis Journal. Semarang: Universitas Negeri Semarang
5. Sumas, Sugiarto. 2012. Dampak Kebijakan Fiskal Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Disertasi. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
6. Widodo, Ari. Waridin, dan Hohanna Maria.K. 2011. Analisis Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Juli 2011. Volume 1 No.1
7. Boachie, M. K., dkk. (2018). Public Health Expenditures and Health Outcomes: New Evidence from Ghana. Economies, 6(4).
8. Palayukan, Marselus. 2019. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal BPPK. 12(2): 74-91.
9. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021*. Jakarta. Kementerian Keuangan RI.
10. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. 2021. *Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2021*. Batam. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
11. BPS Provinsi Kepulauan Riau. 2020. *Indeks Pembangunan Manusia 2020 Provinsi Kepulauan Riau*. Tanjung Pinang: CV. Berkah Mandiri

# LAMPIRAN

## Hasil Regresi 1 (Pengaruh antara Belanja Kesehatan dengan Indeks Kesehatan)

Dalam Regresi data panel statis, terdapat **2 alternatif model** yang digunakan yaitu Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).

### Model 1 : Fixed Effect Model (FEM)

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs   =          48
Group variable: Wilayah                       Number of groups =           8

R-sq:                                         Obs per group:
    within = 0.3658                           min =           6
    between = 0.5234                           avg =          6.0
    overall = 0.4829                           max =           6

corr(u_i, Xb) = 0.5993                       F(1,39)         =        22.50
                                              Prob > F         =        0.0000
```

IndeksKese~n	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
l_BK	.0182967	.0038574	4.74	0.000	.0104943	.0260991
_cons	.2725017	.1002643	2.72	0.010	.0696981	.4753054
sigma_u	.05445253					
sigma_e	.00460204					
rho	.99290791	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u\_i=0: F(7, 39) = 538.36 Prob > F = 0.0000

Pengaruh antara Indeks Kesehatan dan Belanja Kesehatan Signifikan dan Positif.

### Model 2 : Random Effect Model (REM)

```
Random-effects GLS regression               Number of obs   =          48
Group variable: Wilayah                       Number of groups =           8

R-sq:                                         Obs per group:
    within = 0.3658                           min =           6
    between = 0.5234                           avg =          6.0
    overall = 0.4829                           max =           6

corr(u_i, X) = 0 (assumed)                   Wald chi2(1)    =        23.43
                                              Prob > chi2     =        0.0000
```

IndeksKese~n	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
l_BK	.0191671	.0039599	4.84	0.000	.0114058	.0269283
_cons	.2498801	.1042426	2.40	0.017	.0455683	.4541919
sigma_u	.04520712					
sigma_e	.00460204					
rho	.98974324	(fraction of variance due to u_i)				

Pengaruh antara Indeks Kesehatan dan Belanja Kesehatan Signifikan dan Positif, namun terdapat perbedaan coefisien dan constanta nya.

Untuk memilih antar model FEM atau REM yang akan digunakan, maka dilakukan uji hausman :

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) fem	(B) rem		
1_BK	.0182967	.0191671	-.0008703	.0004447

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg  
 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(1) = (b-B)'[(V\_b-V\_B)^(-1)](b-B)  
 = 3.83  
 Prob>chi2 = 0.0503

**Hasil uji hausman :**

REM yang dipilih, karena P value>0,05, maka tidak tolak H0 atau model yang lebih tepat adalah REM

## Hasil Regresi 2 (Pengaruh antara Belanja Pendidikan dengan Indeks Pendidikan)

Dalam Regresi data panel statis, terdapat **2 alternatif model** yang digunakan yaitu Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).

### Model 1 : Fixed Effect Model (FEM)

```
Fixed-effects (within) regression               Number of obs   =          48
Group variable: Wilayah                       Number of groups =           8

R-sq:                                         Obs per group:
    within = 0.2202                          min =           6
    between = 0.5290                         avg =          6.0
    overall = 0.5049                         max =           6

corr(u_i, Xb) = 0.5122                      F(1,39)         =         11.01
                                           Prob > F        =         0.0020
```

IndeksPend~n	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
l_BP	.0364189	.0109751	3.32	0.002	.0142196	.0586181
_cons	-.3167345	.2912025	-1.09	0.283	-.9057471	.272278
sigma_u	.05397541					
sigma_e	.01112878					
rho	.95922231	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u\_i=0: F(7, 39) = 104.12 Prob > F = 0.0000

Pengaruh antara Indeks Pendidikan dan Belanja Pendidikan Signifikan dan Positif.

### Model 2 : Random Effect Model (REM)

```
Random-effects GLS regression               Number of obs   =          48
Group variable: Wilayah                       Number of groups =           8

R-sq:                                         Obs per group:
    within = 0.2202                          min =           6
    between = 0.5290                         avg =          6.0
    overall = 0.5049                         max =           6

corr(u_i, X) = 0 (assumed)                  Wald chi2(1)    =         15.20
                                           Prob > chi2     =         0.0001
```

IndeksPend~n	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
l_BP	.0412994	.0105946	3.90	0.000	.0205343	.0620644
_cons	-.4462265	.2816562	-1.58	0.113	-.9982625	.1058095
sigma_u	.04910521					
sigma_e	.01112878					
rho	.95114738	(fraction of variance due to u_i)				

Pengaruh antara Indeks Pendidikan dan Belanja Pendidikan Signifikan dan Positif, namun terdapat perbedaan coefisien dan constanta nya.

Untuk memilih antar model FEM atau REM yang akan digunakan, maka dilakukan uji hausman :

	—— Coefficients ——		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) fem	(B) rem		
1_BP	.0364189	.0412994	-.0048805	.0033564

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

$$\begin{aligned} \text{chi2}(1) &= (b-B)' [(V_b-V_B)^{-1}] (b-B) \\ &= 2.11 \\ \text{Prob}>\text{chi2} &= 0.1459 \end{aligned}$$

**Hasil uji hausman :**

REM yang dipilih, karena P value>0,05, maka tidak tolak H0 atau model yang lebih tepat adalah REM

## Pengaruh Belanja Ekonomi terhadap Indeks Pengeluaran

### Fixed Effect

Fixed-effects (within) regression  
 Group variable: Wilayah

Number of obs = 48  
 Number of groups = 8

R-sq:  
 within = 0.0386  
 between = 0.7668  
 overall = 0.7044

Obs per group:  
 min = 6  
 avg = 6.0  
 max = 6

corr(u\_i, Xb) = -0.8953  
 F(1,39) = 1.57  
 Prob > F = 0.2181

IndeksPeng~n	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
l_BE	-.0071146	.0056838	-1.25	0.218	-.0186112	.004382
_cons	.984172	.1488101	6.61	0.000	.6831752	1.285169
sigma_u	.05211844					
sigma_e	.00838565					
rho	.97476571	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u\_i=0: F(7, 39) = 46.00 Prob > F = 0.0000

**Tidak signifikan dan negative.**

### Random effect

Random-effects GLS regression  
 Group variable: Wilayah

Number of obs = 48  
 Number of groups = 8

R-sq:  
 within = 0.0386  
 between = 0.7668  
 overall = 0.7044

Obs per group:  
 min = 6  
 avg = 6.0  
 max = 6

corr(u\_i, X) = 0 (assumed)  
 Wald chi2(1) = 2.21  
 Prob > chi2 = 0.1370

IndeksPeng~n	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
l_BE	.0078165	.0052566	1.49	0.137	-.0024863	.0181192
_cons	.5932683	.1379562	4.30	0.000	.322879	.8636576
sigma_u	.02293809					
sigma_e	.00838565					
rho	.88210877	(fraction of variance due to u_i)				

**Tidak signifikan tapi positif**

Untuk memilih antar model FEM atau REM yang akan digunakan, maka dilakukan uji hausman :

**Hasil uji hausman**

	—— Coefficients ——		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) fem	(B) rem		
l_BE	-.0071146	.0078165	-.0149311	.0040979

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg  
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(1) = (b-B)'[(V\_b-V\_B)^(-1)](b-B)  
= 13.28  
Prob>chi2 = 0.0003

**Karena < 0,05 maka dipilih FEM.**



## Pengaruh TKDD terhadap IPM

### Fixed Effect

```

Fixed-effects (within) regression
Group variable: Wilayah

Number of obs   =      48
Number of groups =       8

R-sq:
  within  = 0.1417
  between = 0.0911
  overall  = 0.0916

Obs per group:
      min = 6
      avg = 6.0
      max = 6

corr(u_i, Xb) = 0.0962

F(1,39) = 6.44
Prob > F = 0.0153

```

IPM	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
l_TKDD	2.93302	1.155797	2.54	0.015	.5951998	5.27084
_cons	-8.011138	31.87237	-0.25	0.803	-72.47909	56.45681
sigma_u	5.1065478					
sigma_e	.78784283					
rho	.97675079	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u\_i=0: F(7, 39) = 249.74 Prob > F = 0.0000

signifikan dan positif.

### Random effect

```

Random-effects GLS regression
Group variable: Wilayah

Number of obs   =      48
Number of groups =       8

R-sq:
  within  = 0.1417
  between = 0.0911
  overall  = 0.0916

Obs per group:
      min = 6
      avg = 6.0
      max = 6

corr(u_i, X) = 0 (assumed)

Wald chi2(1) = 7.13
Prob > chi2 = 0.0076

```

IPM	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
l_TKDD	2.989884	1.119783	2.67	0.008	.795149	5.184619
_cons	-9.579225	30.93871	-0.31	0.757	-70.21799	51.05954
sigma_u	5.4786511					
sigma_e	.78784283					
rho	.97973985	(fraction of variance due to u_i)				

signifikan dan positif

Untuk memilih antar model FEM atau REM yang akan digunakan, maka dilakukan uji hausman :

**Hasil uji hausman**

	—— Coefficients ——		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) fem	(B) rem		
1_TKDD	2.93302	2.989884	-.0568644	.2336577

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg  
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(1) = (b-B)'[(V\_b-V\_B)^(-1)](b-B)  
= 0.06  
Prob>chi2 = 0.8077

H0: REM yang dipilih, karena P value>0,05, maka tidak tolak H0 **atau model yang lebih tepat adalah REM**

## Pengaruh belanja keseluruhan (APBN dan APBD) terhadap IPM

### FEM

```
Fixed-effects (within) regression      Number of obs   =       48
Group variable: Wilayah                Number of groups =        8

R-sq:                                Obs per group:
    within = 0.3023                      min =          6
    between = 0.7260                     avg =         6.0
    overall = 0.7115                     max =          6

corr(u_i, Xb) = 0.5568                  F(1, 39)        =       16.90
                                          Prob > F         =       0.0002
```

l_IPM	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
l_BKS	.0567423	.013802	4.11	0.000	.0288251	.0846595
_cons	2.679451	.39084	6.86	0.000	1.888903	3.47
sigma_u	.04679528					
sigma_e	.01023618					
rho	.95433605	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all  $u_i=0$ :  $F(7, 39) = 86.52$  Prob > F = 0.0000

Signifikan dan positif

### REM

Random-effects GLS regression  
Group variable: Wilayah

Number of obs = 48  
Number of groups = 8

R-sq:

within = 0.3023  
between = 0.7260  
overall = 0.7115

Obs per group:

min = 6  
avg = 6.0  
max = 6

corr(u\_i, X) = 0 (assumed)

Wald chi2(1) = 29.91  
Prob > chi2 = 0.0000

l_IPM	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
l_BKS	.066639	.0121847	5.47	0.000	.0427574	.0905206
_cons	2.399203	.3453626	6.95	0.000	1.722305	3.076101
sigma_u	.04147312					
sigma_e	.01023618					
rho	.94258028	(fraction of variance due to u_i)				

## Signifikan dan positif

Untuk memilih antar model FEM atau REM yang akan digunakan, maka dilakukan uji hausman :

## Hasil Uji Hausman

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) fem	(B) rem		
l_BKS	.0567423	.066639	-.0098967	.0068392

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg  
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(1) = (b-B)' [(V\_b-V\_B)^(-1)] (b-B)  
= 2.09  
Prob>chi2 = 0.1479

**H0: REM yang dipilih, karena P value>0,05, maka tidak tolak H0 atau model yang lebih tepat adalah REM**